

KEMITRAAN KONSERVASI PEMULIHAN EKOSISTEM SEBAGAI SOLUSI KONFLIK DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

*(Ecosystem Restoration Conservation Partnership As A Conflict Solution in The
Gunung Halimun Salak National Park)*

Dadang Edi Rochaedi^{1,2}, Dolly Priatna^{1*}, & Sata Yoshida Srie Rahayu¹

¹Program Studi Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Jl. Pakuan Kotak Pos 452,
Bogor 16129, Indonesia; email: dollypriatna@unpak.ac.id

²Direktorat Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gd. Manggala Wanabakti
Blok VII Lt. 7, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia

Diterima 18 Oktober 2021, direvisi 8 Desember 2021, disetujui 13 Desember 2021

ABSTRACT

The ecosystem restoration conservation partnership program is a new policy from the Ministry of Environment and Forestry which aims to reduce conflicts due to forest land use in conservation areas. Gunung Halimun Salak National Park (GHSNP) is one of the conservation areas facing tenure conflicts, particularly in the Gunung Botol Resort area, where there are people who have lived and cultivated the land for decades, long before the Decree of the Designation of the GHSNP was issued. In an effort to address tenurial conflicts in Malasari Village, which is one of the villages within the management area of Gunung Botol Resort, the community took the initiative to collaborate with the GHSNP manager through a scheme called ecosystem restoration conservation partnership. This study aims to formulate a strategy for developing an ecosystem restoration conservation partnership in GHSNP by using a qualitative approach which is presented in a descriptive form. Data were analyzed using SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) technique. The results of the study indicate that the ecosystem restoration conservation partnership program is recommended to be implemented by utilizing existing strengths and opportunities, as well as developed through synergy and collaboration that involves multi-stakeholders.

Keywords: Community, conservation area, ecosystem restoration conservation partnership, tenurial conflict.

ABSTRAK

Program kemitraan konservasi restorasi ekosistem merupakan sebuah kebijakan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertujuan untuk mengurangi konflik pemanfaatan lahan hutan di kawasan konservasi. Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki konflik tenurial, khususnya di kawasan Resort Gunung Botol, dimana terdapat masyarakat yang telah berpuluh-puluh tahun mendiami dan mengolah lahan, jauh sebelum Surat Keputusan (SK) Penetapan Kawasan TNGHS diterbitkan. Dalam upaya mengatasi konflik tenurial di Desa Malasari, salah satu desa yang berada dalam kawasan pengelolaan Resort Gunung Botol, masyarakat berinisiatif bekerja sama dengan pengelola TNGHS melalui skema kemitraan konservasi restorasi ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan kemitraan konservasi restorasi ekosistem di TNGHS dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data dianalisis menggunakan teknik SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Hasil kajian menunjukkan bahwa program kemitraan konservasi restorasi ekosistem direkomendasikan untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta dikembangkan melalui sinergi dan kolaborasi yang melibatkan multi-pihak.

Kata kunci: Masyarakat, kawasan konservasi, kemitraan konservasi pemulihan ekosistem, konflik tenurial.

I. PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia menekankan perlu adanya *corrective action* dalam perancangan tata kelola hutan, yaitu bahwa saatnya hutan benar-benar harus menyejahterakan rakyat (KLHK, 2018) melalui skema kemitraan antara masyarakat dengan pengelola kawasan. Kemitraan ini bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan tenurial, namun dapat menjadi solusi bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraannya karena dapat memanfaatkan hasil hutan dengan tetap menjunjung prinsip pengelolaan hutan lestari. Contoh penyelesaian konflik yang baik adalah melalui skema kemitraan kehutanan (Berliani, 2013; Riski, 2016; Rukminda *et al.*, 2020).

Untuk menciptakan pengelolaan hutan lestari dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan hutan perlu keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kawasan guna mencapai tujuan kelestarian hutan dan kesejahteraan. Hal ini berkaitan dengan akses kelola hutan yang tengah digalakkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang mana telah menyediakan 12,7 juta hektar lahan yang dapat diakses melalui skema perhutanan sosial untuk dikelola masyarakat sekitar kawasan hutan di seluruh Indonesia (Direktorat Jenderal PSKL, 2020).

Seiring dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kehutanan (sekarang KLHK) khususnya di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dengan diterbitkannya SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan luas 113.357 ha, yang sebagian besar merupakan hasil alih fungsi dari hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas, yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor: SK.327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan TNGHS seluas 17.373 ha dan Pengembalian Areal Penggunaan Lain seluas 7.847 ha, maka luas kawasan TNGHS berubah menjadi 87.699 ha (BTNGHS, 2017).

Salah satu masalah dalam pengelolaan TNGHS yang ada di wilayah Resort Gunung Botol yaitu konflik tenurial yang sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan oleh Balai TNGHS. Di dalam kawasan TNGHS terdapat masyarakat yang sudah bermukim dan melakukan pengolahan lahan selama puluhan tahun, dimulai jauh sebelum terbitnya SK Penunjukan TNGHS, yang selama ini dianggap *illegal* karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain desakan masyarakat terhadap kawasan hutan meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan ekonomi (Zulvianita *et al.*, 2021). KLHK telah mengeluarkan beberapa aturan yang bisa memberikan kemudahan dan akses kepada masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan untuk ikut serta berpartisipasi dan bersama-sama mengelola kawasan hutan melalui kerjasama.

Hidayati (2005) menyebutkan bahwa sebagian sawah dan talun masyarakat yang telah digarap sejak tahun 1940-an dimasukkan ke dalam kawasan produksi Perum Perhutani. Lebih lanjut Hidayati (2005) menyampaikan kesaksian Ibu El dari Kampung Nyuncung Desa Malasari, "*Sebelum Perum Perhutani masuk, dulu daerah ini merupakan sawah-sawah garapan dari sebagian besar para orang tua kami. Pengambilan daerah ini menjadi bagian dari kawasan produksi Perum Perhutani dilakukan secara paksa, tanaman padi dirusak, di babat habis*". Pemanfaatan sumber daya alam di dalam kawasan TNGHS telah berlangsung sebelum ditetapkan sebagai taman nasional (Kurniawan *et al.*, 2013).

Perbedaan persepsi, kepentingan, tata nilai, dan akuan hak kepemilikan merupakan empat sumber perbedaan penyebab konflik yang terjadi di TNGHS (Marina & Dharmawan, 2011). Namun permasalahan utama dalam konflik di TNGHS terletak pada perbedaan dalam hak kepemilikan, yang mana pihak taman nasional menganggap bahwa kawasan TNGHS merupakan lahan milik negara, sehingga tidak dapat dibebani hak atas tanah. Sementara itu, masyarakat menganggap bahwa kawasan Gunung Halimun adalah lahan yang dimiliki adat, karena sudah diwariskan oleh leluhur untuk anak cucu mereka.

Kampung Cisangku, Kampung Keramat Banteng, dan Kampung Sijagur merupakan tiga kampung di Desa Malasari yang berada dalam kawasan pengelolaan Resort Gunung Botol, Balai TNGHS. Mayoritas mata pencaharian penduduk Malasari adalah di bidang pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani, sehingga masyarakat sangat bergantung pada lahan garapan untuk pertaniannya. Masyarakat pada umumnya tidak memiliki keahlian lain, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah. Luasan wilayah yang menjadi lokasi kemitraan konservasi pemulihan ekosistem seluas 40,59 ha dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 98 orang, yang merupakan warga ketiga kampung dan melakukan garapan di tiga lokasi tersebut.

Menurut Prabowo *et al.* (2010) dan Surati *et al.* (2021) salah satu penyelesaian konflik kawasan hutan di TNGHS adalah pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat. Sebuah terobosan dalam menyelesaikan persoalan tenurial di kawasan konservasi adalah melalui kemitraan konservasi (Hartoyo, 2019). Hal yang sama disampaikan pula bahwa salah satu alternatif penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah melalui kemitraan konservasi (Prayitno, 2020).

Aulia & Purwandari (2012) menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Desa Malasari

terjadi karena kurang tepatnya kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pengelolaan kolaboratif merupakan proses partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan seperti masyarakat, taman nasional, serta pemerintah desa. Dengan demikian, pola pengelolaan yang melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan pengelolaan, dapat dijadikan sebagai salah satu solusi konflik dalam pengelolaan kawasan TNGHS di Desa Malasari. Dalam upaya menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan di TNGHS, telah dilakukan berbagai program antara lain Model Kampung Konservasi (MKK) untuk pemberdayaan masyarakat, serta program adopsi pohon yang dilakukan masyarakat setempat (Prabowo *et al.*, 2010). Melalui program MKK, masyarakat didorong untuk merestorasi kawasan dengan melakukan penanaman menggunakan anggaran dari *corporate social responsibility* (CSR) atau orang tua angkat (*adopter*).

Dalam upaya mengatasi konflik tenurial di Desa Malasari, pada tahun 2018 masyarakat berinisiaif melakukan kerja sama dengan pengelola TNGHS melalui kemitraan konservasi pemulihan ekosistem sesuai dengan apa yang sedang digalakan pemerintah. Pada tanggal 27 Oktober 2020 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Balai TNGHS dengan Ketua Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) Malasari Lestari, yang disaksikan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Bupati Bogor, dan Camat Nanggung serta kepala dinas terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi yang efektif dalam pengembangan program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di wilayah kerja Resort Gunung Botol TNGHS dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*).

II. METODE PENELITIAN

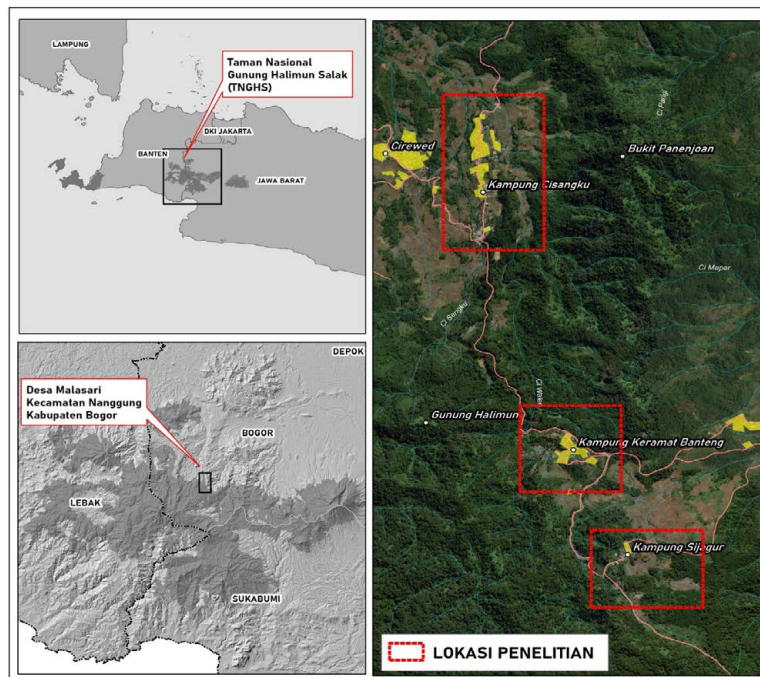
Penelitian dilaksanakan selama sekitar tiga bulan (Februari–April 2021), di tiga lokasi kawasan hutan di wilayah kerja Resort Gunung Botol TNGHS, yang secara administratif berada di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Gambar 1).

Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diuraikan dalam bentuk deskriptif digunakan dalam pengumpulan data selama penelitian (Sugiyono, 2014). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci. Moleong (2005) dan Utomo (2017) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami kemudian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data dengan

pendekatan kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan dan studi dokumentasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan dan responden dengan metode wawancara untuk menghasilkan data yang valid dan berhubungan langsung dengan penelitian. Informan yang dimaksud adalah jajaran pegawai Balai TNGHS, pemerintah desa/kecamatan, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat. Responden adalah anggota KTHK Malasari Lestari. Pemilihan responden dan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling* yaitu metode dimana seorang subyek menunjukan kepada peneliti subjek selanjutnya untuk diwawancarai. *Snowball* adalah informan yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian



Gambar 1. Peta lokasi penelitian di tiga kampung dalam wilayah kerja Resort Gunung Botol, TNGHS, Jawa Barat.

Figure 1. Map of research site in three villages within the management area of Gunung Botol Resort, GHSNP, West Java

terus bertambah dan bertambah sampai peneliti menilai data yang dikumpulkan dari sejumlah informan tersebut telah mencapai titik jenuh (Sugiyono, 2014).

- 2) Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen pendukung Balai TNGHS, monografi Desa Malasari, tesis, skripsi, artikel, jurnal, serta situs di internet yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Data-data kualitatif yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode SWOT dengan perangkat matrik analisis faktor-faktor internal atau IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) dan faktor-faktor eksternal atau EFAS (*External Factors Analysis Summary*). Diagram SWOT dan matrik SWOT digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kekuatan-kelemahan (faktor internal) dan peluang-ancaman (faktor eksternal). Pengembangan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di Resort Gunung Botol dapat ditentukan setelah menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal (Hastanti *et al.*, 2018). Proses penentuan strategi pengembangan dan penghitungan bobot masing-masing strategi dapat dilihat pada Tabel 1.

Menurut Rangkuti (2013) terdapat empat tahapan untuk mengidentifikasi peubah-peubah internal dan eksternal dalam matrik IFAS dan EFAS, yaitu:

- 1) Pada kolom pertama (1) ditentukan faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman).
- 2) Pada kolom kedua (2) pemberian bobot masing-masing peubah dengan skala mulai dari 1 (paling penting) sampai 0 (tidak penting) berdasarkan pengaruh peubah-peubah tersebut. Metode tersebut digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot setiap peubah strategis internal dan eksternal. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5, dimana nilai 1 = tidak penting; 2 = kurang penting; 3 = agak penting; 4 = penting dan 5 = sangat penting.
- 3) Pada kolom ke tiga (3) pemberian rating mulai dari nilai 1 – 4 untuk masing-masing peubah dengan pengaruh, nilai 1 = kecil, nilai 2 = sedang, nilai 3 = besar dan nilai 4 = sangat besar.
- 4) Pada kolom ke empat (4), bobot pada kolom kedua (2) dikalikan dengan rating pada kolom ketiga (3), kemudian hasil kali tersebut dijumlahkan menjadi nilai atau skor pada kolom ke empat untuk memperoleh total skor pembobotan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pengembangan kemkon PE di Resort Gunung Botol dirumuskan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan

Tabel 1. Proses penentuan strategi
 Table 1. The process of strategy determination

EFAS	IFAS	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Peluang (<i>Opportunities</i>)		Nilai bobot untuk strategi SO = (nilai yang dibobot untuk faktor internal kekuatan) + (nilai yang di bobot untuk faktor eksternal peluang)	Nilai bobot untuk strategi WO = (nilai yang dibobot untuk faktor internal kelemahan) + (nilai yang di bobot untuk faktor eksternal peluang)
Ancaman (<i>Threats</i>)		Nilai bobot untuk strategi ST = (nilai yang dibobot untuk faktor internal kekuatan) + (nilai yang di bobot untuk faktor eksternal ancaman)	Nilai bobot untuk strategi WT = (nilai yang dibobot untuk faktor internal kelemahan) + (nilai yang di bobot untuk faktor eksternal ancaman)

kemitraan konservasi. Faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal merupakan perangkat-perangkat yang digunakan dalam menganalisis SWOT. Analisis ini dilakukan dengan melihat faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman). Faktor-faktor diperoleh dari berbagai responden, informan dan literatur sehingga didapatkan sejumlah faktor yang dapat diajukan sebagai bahan pertanyaan dalam wawancara, kemudian didapatkan peubah-peubah yang menjadi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pengembangan kemitraan konsevasi. Berikut tabel hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal pengembangan kemkon PE seperti disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Adapun faktor-faktor internal berupa kekuatan (*strengths*) adalah:

1) *Regulasi tentang kemitraan konservasi pemulihan ekosistem*

Yang menjadi poin penting berjalannya program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem adalah terbitnya regulasi yang berpihak pada masyarakat sekitar kawasan konservasi termasuk TNGHS, yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Peraturan Menteri LHK Nomor P.43/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan

Menteri LHK Nomor P.44/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

2) *Perjanjian Kerja Sama (PKS)*

Naskah PKS telah ditandatangani oleh Kepala Balai TNGHS dan Ketua KTHK Malasari Lestari yang disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal KSDAE dan Bupati Bogor. Dengan adanya PKS ini kegiatan masyarakat dalam melakukan lahan garapan menjadi legal. Harapan kedepannya dengan adanya legalitas PKS, masyarakat dapat difasilitasi dalam pengembangan kemitraan konservasi guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

3) *Kompetensi SDM untuk fasilitasi*

Sumber daya manusia (SDM) TNGHS di Resort TNGHS memiliki kompetensi yang cukup dan telah memahami tahapan dan prosedur di dalam proses pengusulan dan pendampingan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di Malasari. Dampak dari terbentuknya KTHK Malasari Lestari, saat ini muncul pengajuan baru oleh lima kelompok baru untuk mengajukan kemitraan

Tabel 2. Analisis faktor-faktor internal

Table 2. Analysis of internal factors

No.	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	No.	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1.	Regulasi terkait kemitraan konservasi	1.	Anggaran kegiatan kemitraan konservasi
2.	Legalitas berupa PKS	2.	Jumlah SDM TNGHS Resort Gn. Botol masih kurang
3.	Kompetensi SDM untuk fasilitasi	3.	Sarana seperti GPS, <i>drone</i>
4.	Partisipasi & kepedulian masyarakat meningkat terhadap kawasan	4.	Pergantian Kepala Desa
5.	Tidak ada lagi konflik antara petugas dan masyarakat	5.	Pola pikir masyarakat masih rendah
6.	Tokoh masyarakat sebagai perantara informasi		

konservasi di wilayah kerja Resort Gunung Botol.

4) *Partisipasi dan kepedulian masyarakat meningkat terhadap kawasan*

Gangguan kawasan TNGHS khususnya yang berada di areal atau sekitar kemitraan konservasi terjaga dengan baik. Anggota KTHK memiliki kesadaran dan kepedulian serta berpartisipasi untuk melakukan penjagaan dan bersepakat tidak akan melakukan gangguan terhadap kawasan termasuk perluasan areal garapan.

5) *Tidak ada lagi konflik antara petugas dengan masyarakat*

Sejak dimulainya inisiasi kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di Malasari, tidak pernah terjadi konflik antara petugas dengan masyarakat, bahkan sebaliknya hubungan komunikasi dan koordinasi antara petugas TNGHS, LSM, dan masyarakat terjalin dengan sangat baik. Masing-masing pihak saling mendukung untuk tercapainya kesepakatan dan legalitas kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di Malasari.

6) *Tokoh masyarakat sebagai perantara komunikasi*

Tokoh masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam program kemitraan konservasi dan memiliki peranan dalam menggerakkan warganya, dimana peran tokoh masyarakat sebagai perantara komunikasi dan penyeimbang informasi di kalangan masyarakat.

Faktor-faktor internal berupa kelemahan (*weaknesses*) yaitu:

1) *Anggaran*

Keterbatasan ketersediaan anggaran dalam mendukung kecepatan dan percepatan semua pihak dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kemitraan konservasi ini menjadi faktor kelemahan. Beberapa tahapan yang membutuhkan anggaran adalah inventarisasi areal garapan dan rangkaian pertemuan-

pertemuan. Menurut masyarakat, anggaran menjadi salah satu penghambat dalam hal pemodalannya untuk pembelian bibit dan pupuk

2) *Jumlah SDM TNGHS Resort Gunung Botol masih kurang*

Petugas lapangan yang ada di wilayah Resort Gunung Botol sangat minim untuk melakukan pendampingan kemitraan konservasi di Malasari sehingga menjadi faktor kelemahan juga dengan jumlah personil saat ini sebanyak 3 orang (2 orang PNS dan 1 orang honorer), tentunya dengan jumlah/kuantitas seperti ini boleh dikatakan sangat kurang dibandingkan dengan luasan area kemitraan konservasi yang sudah ada dan potensial terdapat usulan-usulan baru program kemitraan konservasi lainnya di Desa Malasari atau desa lainnya.

3) *Peralatan*

Salah satu tahapan yang paling rumit dan membutuhkan dukungan sarana adalah inventarisasi areal garapan masyarakat. Sarana pendukung yang sangat dibutuhkan saat ini adalah GPS dan *drone*. Dengan sarana ini kemudahan dan kecepatan pemetaan lahan garapan lebih cepat dan akurat.

4) *Pergantian kepala desa*

Menurut beberapa informan dan anggota KTHK, pergantian kepala desa termasuk faktor kelemahan, karena pada awal-awal pemilihan kepala desa yang baru menjadi jaga jarak yang menyebabkan kekhawatiran salah pendapat diantara masyarakat sehingga dianggap memilih salah satu kandidat calon kepala desa.

5) *Pola pikir masyarakat masih rendah*

Mayoritas penduduk Desa Malasari khususnya ketiga kampung yang menjadi anggota KTHK berpendidikan rendah dengan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar itupun ada beberapa anggota yang tidak menyelesaikan pendidikannya membuat pola pikir masyarakat masih rendah.

Tabel 3. Analisis faktor-faktor eksternal
Table 3. Analysis of external factors

No.	Peluang (<i>Opportunities</i>)	No.	Ancaman (<i>Threats</i>)
1.	Dukungan Pemerintah Kabupaten	1.	Potensi konflik horisontal karena provokasi kelompok tertentu
2.	Dukungan LSM setempat	2.	Perambahan baru
3.	Pembiayaan usaha kemitraan	3.	Bencana alam
4.	Pengembangan ekonomi kreatif (jaringan pasar terbuka luas)		
5.	Aksesibilitas terjangkau		

Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Faktor-faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar pengelola TNGHS dan anggota KTHK.

Faktor-faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) dalam pengembangan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di Resort Gunung Botol antara lain:

1) *Dukungan pemerintah kabupaten*

Pasca penandatanganan PKS yang dihadiri Bupati Bogor, pemerintah kabupaten mulai memberikan dukungan dengan mengerahkan dinas-dinas terkait untuk berkontribusi dalam kegiatan kemitraan konservasi di Malasari sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

2) *Dukungan LSM setempat*

Dimulai dari inisiasi sampai berjalannya kemitraan konservasi tidak terlepas dari peran LSM lokal yaitu Sawit Watch dalam pendampingan dan mensosialisasikan program kemitraan konservasi di TNGHS termasuk Desa Malasari melalui kolaborasi dengan LSM lainnya membantu peningkatan kapasitas anggota KTHK dalam menangani solusi konflik melalui pendidikan dan latihan, patroli pengamanan, pengukuran lahan garapan dan hal-hal yang terkait kemitraan konservasi.

3) *Pembiayaan usaha kemitraan*

Dengan adanya PKS menjadikan salah satu bukti pengakuan legal dari KLHK, sehingga mitra akan lebih mudah

mendapatkan fasilitas kemitraan konservasi berupa fasilitas pengembangan, bantuan ekonomi produktif serta bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

4) *Pengembangan ekonomi kreatif*

Desa Malasari memiliki potensi pariwisata yang sudah terkenal dengan potensi alamnya berupa curug dan pengelolaan pertanian secara tradisional. Potensi ini dapat menjadi peluang usaha tumbuhnya ekonomi kreatif melalui Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) hasil dari program kemitraan konservasi Desa Malasari yang komoditasnya antara lain: jahe merah, cengkeh, kopi dan sebagainya.

5) *Aksesibilitas terjangkau*

Aksesibilitas sendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat kemudahan untuk mencapai atau mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Aksesibilitas yang tinggi dapat tercipta dengan ketersediaan prasarana (jaringan jalan) yang baik dan didukung dengan ketersediaan sarana atau fasilitas untuk melakukan pergerakan. Desa Malasari memiliki aksesibilitas yang cukup baik, dimana jaringan jalan sudah masuk ke kampung dan areal lokasi penggarapan anggota KTHK sehingga lebih mudah dalam memasarkan hasil dari program kemitraan konservasi.

Faktor-faktor eksternal lainnya adalah ancaman (*threats*) yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kemkon PE yaitu:

1) *Potensi konflik horizontal karena provokasi kelompok tertentu*

Tuntutan masyarakat terhadap lahan sangat tinggi terhadap kawasan oleh sebagian masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak tergabung dalam program kemitraan konservasi sehingga berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal sehingga bisa menjadi faktor ancaman dalam program kemitraan konservasi.

2) *Perambahan baru*

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap lahan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah dikhawatirkan timbul pembukaan lahan-lahan baru sebagai lahan garapan apabila sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat kurang intensif dari pihak TNGHS.

3) *Bencana alam*

Kondisi yang berbukit-bukit di dalam kawasan TNGHS dan pada sebagian masyarakat bertani dengan tidak

memperhatikan aspek konservasi dapat menimbulkan bencana alam berupa tanah longsor seperti yang terjadi pada Januari 2020 di beberapa kampung di wilayah Desa Malasari dan juga beberapa desa penyangga TNGHS wilayah Bogor Barat lainnya serta Kabupaten Lebak, sehingga perlunya sosialisasi dan pendampingan petugas TNGHS kepada masyarakat secara intensif terkait pola penggunaan lahan.

Berdasarkan hasil penilaian bobot, rating dan skoring faktor internal program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di TNGHS Resort Gunung Botol disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4. di bawah, hasil penilaian total faktor internal kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di TNGHS Resort Gunung Botol dengan cara menghitung selisih nilai total kekuatan dengan nilai total kelemahan. Skor total dari faktor kekuatan (*strengths*) sebesar 2,02 dan skor faktor kelemahan (*weaknesses*) sebesar 1,14. Selisih dari skor total faktor kekuatan

Tabel 4. Perhitungan skor faktor-faktor internal
Table 4. Score calculation of internal factors

Faktor internal (Internal factors)	Bobot (Weight)	Rating (Rating)	*Skor (Score)
(1)	(2)	(3)	(4)
Faktor kekuatan (Strengths)			
Regulasi terkait kemitraan konservasi	0,12	4,0	0,48
Faktor legal berupa PKS	0,12	4,0	0,48
Kompetensi SDM untuk fasilitasi	0,10	3,0	0,29
Partisipasi &kepedulian masyarakat meningkat terhadap kawasan	0,10	3,0	0,29
Konflik antara petugas dan masyarakat berkurang	0,10	3,0	0,29
Tokoh masyarakat	0,07	3,0	0,21
	0,60		2,02
Faktor kelemahan (Weaknesses)			
Anggaran kegiatan kemitraan konservasi	0,10	3,0	0,29
Jumlah SDM TNGHS masih kurang	0,10	3,0	0,29
Sarana seperti GPS, drone	0,07	3,0	0,21
Pergantian Kepala Desa	0,07	2,0	0,14
Pola pikir masyarakat masih rendah	0,07	3,0	0,21
	0,40		1,14
Total	1,00	S-W = (X)	0,88
S - W = (X) = 2,02 - 1,14 = 0,88 (kuat/strong)			

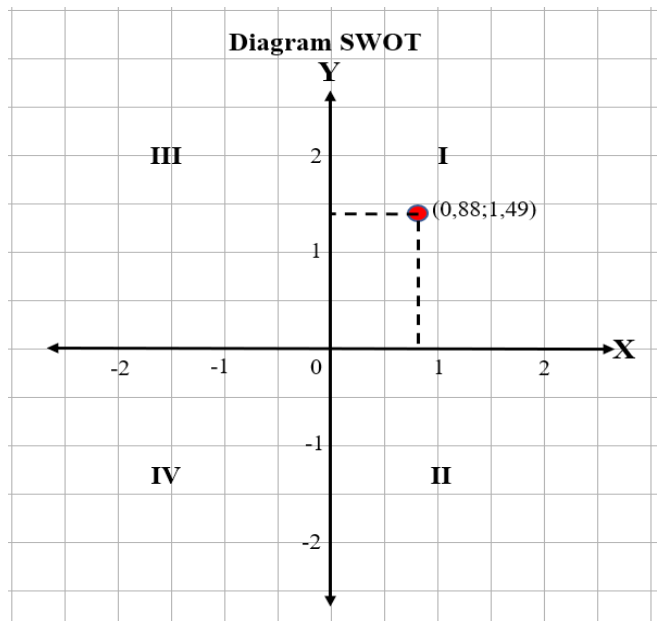
dengan skor total faktor kelemahan didapat nilai sebesar 0,88. Hasil perhitungan ini berarti kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di TNGHS Resort Gunung Botol berada pada sumbu X positif. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan konservasi memiliki kekuatan yang sangat baik, dapat dijadikan sebagai pijakan awal dalam pengembangan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem. Faktor kekuatan dapat menutupi faktor kelemahan yang ada pada program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem.

Berdasarkan hasil pembobotan, faktor kekuatan (*strengths*) yang memiliki pengaruh sangat penting (kuat) adalah regulasi kemitraan konservasi dan legalitas berupa PKS, sedangkan hasil pembobotan faktor kelemahan, yang memiliki pengaruh adalah anggaran program kemitraan konservasi, sedangkan hasil penilaian bobot, rating, dan skoring faktor eksternal program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di TNGHS Resort Gunung Botol disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5. di bawah, hasil penilaian total faktor eksternal kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di TNGHS Resort Gunung Botol dengan cara menghitung selisih nilai total peluang dengan nilai total ancaman. Skor total dari faktor peluang (*opportunities*) sebesar 2,34 dan skor faktor ancaman (*threats*) sebesar 0,86. Selisih dari skor total faktor peluang dengan skor total faktor kelemahan didapat nilai sebesar 1,49. Hasil perhitungan ini berarti kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di TNGHS Resort Gunung Botol berada pada sumbu Y positif. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan konservasi memiliki ancaman yang kuat dari luar terkait dengan peluang pengembangannya. Namun melihat peluang yang ada, ancaman tersebut dapat terselesaikan atau teratasi apabila peluang yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Balai TNGHS selaku pengelola. Hasil pembobotan, faktor peluang (*opportunities*) yang memiliki pengaruh sangat penting (kuat) adalah dukungan pemerintah daerah dan dukungan LSM

Tabel 5. Perhitungan skor faktor-faktor eksternal
 Table 5. Score calculation of external factors

Faktor eksternal (<i>External factors</i>)	Bobot (<i>Weight</i>)	Rating (<i>Rating</i>)	Skor = Bobot x Rating (<i>Score = Weight x Rating</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)
Faktor peluang (<i>Opportunities</i>)			
Dukungan Pemerintah Kabupaten	0,14	4,0	0,57
Dukungan LSM setempat	0,14	4,0	0,57
Pembiayaan usaha kemitraan	0,14	3,0	0,43
Pengembangan ekonomi kreatif	0,14	3,0	0,43
Aksesibilitas terjangkau	0,11	3,0	0,34
	0,69		2,34
Faktor ancaman (<i>Threats</i>)			
Potensi konflik horisontal karena provokasi kelompok tertentu	0,11	3,0	0,34
Perambahan baru	0,11	3,0	0,34
Bencana alam	0,09	2,0	0,17
	0,31		0,86
Total	1,00	O-T =	1,49
		(Y)	
O - T = (Y) = 2,34 - 0,86 = 1,49 (tinggi/high)			



Gambar 2. Posisi kemitraan konservasi pemulihan ekosistem pada kuadran SWOT
 Figure 2. Position of ecosystem restoration conservation partnership in the SWOT quadrant

lokal, sedangkan hasil pembobotan faktor ancaman, yang memiliki pengaruh adalah potensi konflik horisontal karena provokasi kelompok tertentu dan perambahan.

Berdasarkan hasil analisis (Gambar 2), bahwa faktor internal diperoleh nilai 0,88 pada sumbu X (positif) dan faktor eksternal diperoleh nilai 1,49 pada sumbu Y (positif). Dengan demikian posisi kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di TNGHS Resort Gunung Botol berada pada kuadran I (0,88;1,49). Hal ini berarti bahwa program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem bernilai positif baik dari faktor kekuatan (*strengths*) maupun faktor peluang (*opportunities*). Hasil ini menunjukkan bahwa program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di TNGHS Resort Gunung Botol berada pada posisi yang kuat. Posisi ini merupakan posisi situasi yang sangat menguntungkan. Program kemitraan konservasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Tahap selanjutnya digunakan metode analisis matrik SWOT untuk memformulasikan alternatif strategi yang layak dan tepat dengan mencocokkan pada faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Perumusan strategi dibuat dalam sebuah matrik analisis SWOT sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Dari hasil analisis SWOT, bahwa program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem berada pada kuadran I (strategi SO) yaitu strategi agresif dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) yang ada untuk mengembangkan kemitraan konservasi di TNGHS. Hal ini berarti dengan keadaan faktor ini menunjukkan bahwa kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di Resort Gunung Botol berada pada posisi yang menguntungkan dimana program ini memiliki faktor kekuatan dan faktor peluang yang tinggi sehingga dapat menutupi kelemahan dan ancaman yang ada dan sangat berpengaruh pada pengembangan program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di TNGHS.

Tabel 6. Matrik SWOT
Table 6. Matrix of SWOT

Faktor internal (Internal factors) Faktor eksternal (External factors)	Kekuatan (Strengths/S)	Kelemahan (Weaknesses/W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi terkait kemitraan konservasi 2. Faktor legal berupa PKS 3. Kompetensi SDM untuk fasilitasi 4. Partisipasi & kepedulian masyarakat meningkat terhadap kawasan 5. Konflik antara petugas dan masyarakat tidak ada lagi 6. Tokoh masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran kegiatan kemitraan konservasi 2. Jumlah SDM TNGHS masih kurang 3. Sarana seperti GPS, <i>drone</i> 4. Pergantian kepala desa 5. Pola pikir masyarakat masih rendah
Peluang (Opportunities/O)	Strategi SO (Strategy of SO)	Strategi WO (Strategy of WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah Kabupaten 2. Dukungan LSM setempat 3. Pembiayaan usaha kemitraan 4. Pengembangan ekonomi kreatif 5. Aksesibilitas terjangkau 	<p>Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah/instansi terkait program kemitraan konservasi 2. Kolaborasi pengelolaan kemitraan konservasi dengan melibatkan <i>multistakeholder</i> 3. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM di tingkat tapak/resort 4. Peningkatan/penambahan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TNGHS 5. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat 	<p>Meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah SDM TNGHS di tingkat tapak 2. Meningkatkan fungsi kelembagaan yang ada agar lebih berkembang 3. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan TNGHS 4. Mendorong BUMDES (badan usaha milik desa) untuk mendukung pendanaan kemitraan konservasi
Ancaman (Threats/T)	Strategi ST (Strategy of ST)	Strategi WT (Strategy of WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi konflik horisontal karena Provokasi kelompok tertentu 2. Perambahan baru 3. Bencana alam 	<p>Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran aktif petugas Resort TNGHS kepada masyarakat 2. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat secara intensif 3. Meningkatkan peran tokoh masyarakat 	<p>Meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat 2. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan TNGHS 3. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat

Strategi pengembangan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di TNGHS Resort Gunung Botol memiliki strategi agresif yaitu strategis SO (*strengths* dan *opportunities*) melalui:

- 1) *Memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah/instansi terkait program kemitraan konservasi*

Dengan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor mengerahkan

dinas-dinas terkait untuk berkontribusi dalam kegiatan kemitraan konservasi di Malasari sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

- 2) *Kolaborasi pengelolaan kemitraan konservasi dengan melibatkan multistakeholder*

Dengan kolaborasi yang melibatkan *multistakeholder* seperti taman nasional, pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan

LSM, serta masyarakat itu sendiri diharapkan membantu peningkatan kapasitas anggota KTHK dalam menangani solusi konflik melalui pendidikan dan latihan, patroli pengamanan, pengukuran lahan garapan dan hal-hal yang terkait kemitraan konservasi.

3) *Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM di tingkat tapak/resort*

Sumber daya manusia TNGHS di Resort TNGHS masih terbatas sehingga diperlukan penambahan atau melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan TNGHS.

4) *Peningkatan /penambahan anggaran dalam DIPA TNGHS*

Dengan adanya alokasi penambahan anggaran dalam DIPA Balai TNGHS, pelaksanaan identifikasi dan sarana yang menghambat dalam program kemitraan konservasi dapat teratasi.

5) *Sosialisasi dan pendampingan masyarakat*

Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat oleh TNGHS sehingga masyarakat lebih mengetahui dan paham kemitraan konservasi serta dapat mendorong keterlibatan dalam program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terbitnya peraturan tentang perhutanan sosial masyarakat berinisiatif untuk melakukan kerja sama dengan pengelola TNGHS melalui kemitraan konservasi pemulihan ekosistem. Pembangunan kemitraan konservasi dilakukan melalui pendekatan secara *bottom-up*, *persuatif* dan *kolaboratif*.

Bagi pengelola TNGHS dan anggota mitra KTHK Malasari Lestari, program kemitraan konservasi dikatakan berhasil pada tahap resolusi konflik tenurial yaitu masyarakat diberikan rasa tenang, nyaman dan aman karena diakui dan diberi akses

legal untuk mengelola areal garapan di dalam kawasan.

Hasil analisis SWOT, program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem berada pada kuadran I (strategi SO) yaitu strategi agresif dengan memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan memanfaatkan peluang (*opportunities*) yang ada untuk mengembangkan kemitraan konservasi di TNGHS melalui penguatan sinergi dan kolaborasi dengan melibatkan *multistakeholder*.

B. Saran

Saran yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan melibatkan *multistakeholder* dalam upaya pengembangan kemitraan konservasi pemulihan ekosistem; dan
- 2) Perlunya penelitian lebih lanjut terkait kajian dampak ekonomi pada program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem di Resort Gunung Botol.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai dan staf TNGHS, Pemerintah Desa Malasari, KTHK Malasari Lestari, teman-teman LSM Sawit Watch serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam mewujudkan penelitian ini. Penelitian ini secara parsial didanai oleh Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Internal Universitas Pakuan 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, T., & Purwandari, H. (2012). Pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemerintah vs komunitas lokal : Upaya mencari titik temu. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 6(1), 46–60. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/802>
- Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. (2017). *Rencana pengelolaan jangka panjang Taman Nasional Gunung Halimun Salak tahun 2018-2027* (pp. 1–102).

- Direktorat Jenderal PSKL. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 2020-2024*.
- Hartoyo, D. ; F. P. E. ; S. P. K. (2019). Kemitraan konversi dan masa depan hutan Papua. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 149.
- Hastanti, B. (2018). Development strategy of Masoi (*Cryptocarya massoia* (Oken) Kosterm.) as Non-Timber Forest Products in Teluk Bintuni, West Papua With SWOT Analysis. *Jurnal Wasian*, 5(1), 43–56. <https://doi.org/10.20886/jwas.v5i1.4202>.
- Hidayati, U. (2005). Ketidadaan dalam keberadaan studi kasus tentang beban berlebih pada petani (peasant) perempuan di dua desa dalam kawasan ekosistem halimun. *International Symposium of the Journal Antropologi Indonesia*, 1–18.
- KLHK. (2018). Refleksi hutan sosial: Hutan Untuk rakyat. humas. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1718. Diunduh pada tanggal 25 Oktober 2020.
- Kurniawan, W., Kusmana, C., Basuni, S., Munandar, A., & Kholil, K. (2013). Landuse Conflicts Analysis at Mount Halimun Salak National Park. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 3(1), 23–30. <https://doi.org/10.19081/jpsl.2013.3.1.23>.
- Marina, I., & Dharmawan, H. (2011). Analisis Konflik Sumberdaya Hutan di Kawasan Konservasi. *Solidarity: Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 05(01), 90–96.
- Moleong, J. L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA.
- Prabowo, S. A., Basuni, S., Suharjito, D., Pascasarjana, S., & Bogor, I. P. (2010). Konflik tanpa henti: Permukiman dalam Kawasan Taman Nasional Halimun Salak. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 16(3), 137–142.
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6. <https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/175>.
- Rangkuti. (2013). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rukminda, G. M., Soekmadi, R., & Adiwibowo, S. (2020). Perspektif masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di kesatuan pengelolaan hutan lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi*, 25(1), 17–25. <https://doi.org/10.29244/medkon.25.1.17-25>.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surati, Sylviani, Sakuntaladewi, Niken. Hidayat, Dian Charity & Ariawan, K. (2021). Persepsi masyarakat hukum adat terhadap keberadaan hutan di Kasepuhan Karang dan Cisungsang Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 18(2), 99–115.
- Utomo, J. P. (2017). *Strategi pengembangan wisata alam di Pulau Madura pasca pembangunan jembatan Suramadu (studi kasus pada dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bangkalan)*. (Skripsi) Universitas Brawijaya, Malang.
- Zulvianita, Desiana., Purnamahati, Rina Ratnasih, & Dwiartama, A. (2021). Evaluasi dan strategi pengelolaan penyadapan pohon pinus sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Sumedang, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 18(1), 1–14.